



PT JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**



PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 DESEMBER 2021 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Perhitungan laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif	2
3. Laporan Perubahan Ekuitas	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5 – 25



PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)

Jl. Lingkar Tasangka Nomor 1A - Jayapura
Telp. (0967) 5166732 Email: jamkridapapua@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN PT JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA) TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Desty Pongsikabe
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH III - No. 1A Angkasapura, Jayapura

- Nama : Edwin Malkel Jelmau
- Jabatan : Direktur
- Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin, SH III - No. 1A Angkasapura, Jayapura

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Papua (Perseroda) tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan Keuangan PT Jamkrida Papua (Perseroda) tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Jamkrida Papua (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan PT Jamkrida Papua (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Jamkrida Papua (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jayapura, 24 Maret 2022

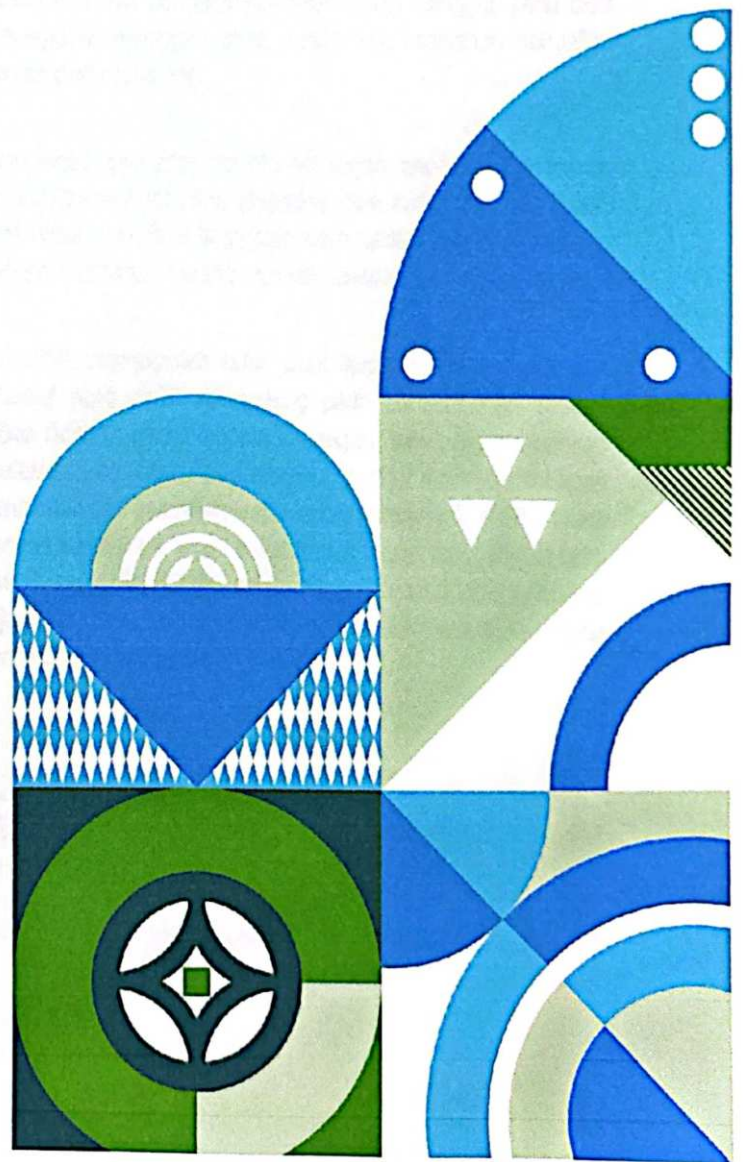
PT JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)


Desty Pongsikabe
Direktur Utama


Edwin Malkel Jelmau
Direktur



Laporan Auditor Independen





KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

IZIN MENKEU.RI.NO.44/KM.1/2018

IZIN AP : KMK No.769/KM.1/2017 | KMK No.770/KM.1/2017 | KMK No.1199/KM.1/2017 | KMK No.373/KM.1/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00068/3.0377/AU.1/08/1533-3/1/III/2022

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT. Jamkrida Papua (Perseroda)
di
Papua

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Jamkrida Papua (Perseroda) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian intern yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

www.kapyaniswar.com

Kantor Cabang Makassar
Jl. Langgau Lt 8 No.6 Timungan Lompoe
Bontoala - Makassar
Telp. 0411 800 2274 - 0811 4665 51 - 0821 9636 7779
e-mail: kapyda03mks@gmail.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

IZIN MENKEU.RI.NO.44/KM.1/2018

IZIN AP : KMK No.769/KM.1/2017 | KMK No.770/KM.1/2017 | KMK No.1199/KM.1/2017 | KMK No.373/KM.1/2018

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 huruf k bahwa Perseroan tidak membentuk cadangan atas imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24. Selanjutnya pada Catatan 9 dan 10, Perseroan mengakui pendapatan sewa ruko yang belum jatuh tempo (kadaluarsa) pada tahun 2021 serta membebani bunga deposito, biaya pengambilalihan anak perusahaan, dan biaya pendidikan Komisaris dan Direksi kepada Anak Perusahaan PT. BPR Phidectama Biak, namun PT. BPR Phidectama Biak tidak sepakat dengan pembebanan tersebut.

Opini

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak sebagaimana yang diuraikan pada basis untuk opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Jamkrida Papua (Perseroda) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hal Lain

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 34, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 masih dipengaruhi dampak pandemi covid-19 dan langkah-langkah pemulihan perekonomian yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia dalam tahun 2021 kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 3,5 persen atau tetap di level rendah. akibatnya suku bunga perbankan terus mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada usaha penjaminan kredit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANISWAR & REKAN

ASRI RAZAK, Ak., CA., CPA

Nomor Register Akuntan Publik (NRAP): AP.1533

Makassar, 25 Maret 2022



www.kapyaniswar.com

Kantor Cabang Makassar
Jl. Langgau Lt 8 No 6 Timungan Lompoe
Bontoala - Makassar

Telp. 0811 800 2274 - 0811 4665 51 - 0821 9636 7779

Laporan Keuangan



PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	31 - 12 - 2021	31 - 12 - 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4b, 7	909,828,300	1,395,282,936
Investasi Lancar	4c, 8	46,168,509,908	36,479,759,908
Pendapatan YMH Diterima	9	544,095,721	330,815,249
Piutang Co-Guarantee/Reasuransi/Penjaminan Ulang		-	-
Piutang Lain-lain	10	126,462,993	107,630,100
Biaya Dibayar Dimuka	4d, 11	3,110,325	65,761,807
Jumlah Aset Lancar		47,752,007,247	38,379,249,999
Aset Tidak Lancar			
Investasi Tidak Lancar	4e, 12	10,409,917,263	10,409,917,263
Penyertaan PT. BPR Phidectama Biak	4f, 13	8,149,500,000	950,000,000
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan)	4f, 14	8,579,901,467	135,578,294
Aset Tidak Berwujud	15	176,250,000	188,000,000
Aset Tidak Lancar Lainnya	16	377,561,310	5,063,392,092
Jumlah Aset Tidak Lancar		27,693,130,040	16,746,887,649
JUMLAH ASET		75,445,137,287	55,126,137,648
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
IJP Yang Ditangguhkan - Lancar	4g, 17	486,077,255	445,108,325
Utang Co-Guarantee/Reasuransi/Penjaminan Ulang	4g, 18	-	16,662,001
Utang Komisi	19	-	9,362,834
Cadangan Klaim	4i, 20	96,654,230	5,771,904
Utang Pajak	4j, 21	4,066,245	374,533
Liabilitas Lancar Lainnya	22	212,676,763	138,159,867
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		799,474,493	615,439,464
Liabilitas Jangka Panjang			
IJP Yang Ditangguhkan	4g, 23	392,617,067	566,059,823
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya		-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		392,617,067	566,059,823
Jumlah Liabilitas		1,192,091,560	1,181,499,287
EKUITAS			
Modal Saham	24	70,100,000,000	50,100,000,000
Cadangan Umum	25	1,840,127,692	1,532,287,112
Selisih Akuisisi	26	199,500,000	-
Laba/(Rugi) Tahun Yang Lalu	27	1,081,010,668	1,080,988,926
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan		1,032,407,366	1,231,362,323
Jumlah Ekuitas		74,253,045,726	53,944,638,361
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		75,445,137,287	55,126,137,648

*Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN	28		
- Imbalan jasa penjaminan bruto		1,497,413,252	769,449,942
- Pendapatan klaim IJP Co-Guarantee/Reasuransi		-	-
- IJP co-guarantee/IJP/premi reasuransi		(115,507,970)	(159,558,338)
- Pendapatan komisi penjaminan		-	-
- Pendapatan/(Beban) komisi penjaminan - bersih		(43,902,448)	(73,549,544)
Jumlah Pendapatan IJP netto		1,338,002,834	536,342,060
BEBAN KLAIM	29		
- Beban klaim - bruto		517,836,087	114,878,022
- Beban klaim co-guarantee/IJP/premi reasuransi		(28,406,411)	(31,600,715)
- Penurunan/(kenaikan) cadangan klaim		90,882,326	(24,672,766)
- Beban klaim lainnya		-	-
Jumlah Beban Klaim netto		580,312,002	58,604,541
LABA/(RUGI) BRUTO		757,690,833	477,737,519
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
- Pendapatan bunga investasi	30	3,330,869,946	3,597,355,023
- Pendapatan operasional lain-lain		-	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		3,330,869,946	3,597,355,023
BEBAN OPERASIONAL	31		
- Beban gaji dan pegawai		2,208,175,016	2,042,836,556
- Beban administrasi dan umum		505,240,350	339,877,149
- Beban penyusutan dan amortisasi		132,488,970	94,622,608
- Beban operasional lain-lain		414,312,261	332,758,840
Jumlah Beban Usaha		3,260,216,598	2,810,095,153
LABA/(RUGI) USAHA		828,344,181	1,264,997,389
PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL	32		
- Pendapatan dividan dan sewa		218,762,321	17,179,607
- Pendapatan subrogasi		3,775,370	600,068
- Beban non operasional		(11,277,000)	(46,461,709)
Jumlah Pendapatan Non Operasional		211,260,691	(28,682,034)
PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK		1,039,604,872	1,236,315,355
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	33	7,197,507	4,953,032
LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK		1,032,407,366	1,231,362,323

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR	CADANGAN UMUM	SELISIH AKUISISI	SALDO LABA/(RUGI)	JUMLAH EKUITAS
Saldo per 31 Desember 2017	50,100,000,000	847,672,050	-	811,972,096	51,759,644,146
Tahun 2018					
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	833,258,406	833,258,406
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Cadangan umum	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2018	50,100,000,000	847,672,050	-	1,645,230,502	52,592,902,551
Tahun 2019					
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1,270,373,486	1,270,373,486
Pembagian dividen	-	-	-	(500,000,000)	(500,000,000)
Cadangan umum	-	367,021,691	-	(367,021,691)	-
Pembagian tantiem	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2019	50,100,000,000	1,214,693,741	-	2,048,582,297	53,363,276,037
Tahun 2020					
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1,231,362,323	1,231,362,323
Pembagian dividen	-	-	-	(550,000,000)	(550,000,000)
Cadangan umum	-	317,593,371	-	(317,593,371)	-
Pembagian tantiem	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
Saldo per 31 Desember 2020	50,100,000,000	1,532,287,112	-	2,312,351,249	53,944,638,361
Tahun 2021					
Tambahan Setoran modal	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000
Selisih Akuisisi Anak Perusahaan	-	-	199,500,000	-	199,500,000
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1,032,407,366	1,032,407,366
Pembagian dividen	-	-	-	(800,000,000)	(800,000,000)
Cadangan umum	-	307,840,581	-	(307,840,581)	-
Pembagian tantiem dan bonus	-	-	-	(123,500,000)	(123,500,000)
Saldo 31 Desember 2021	70,100,000,000	1,840,127,693	199,500,000	2,113,418,034	74,253,045,726

*Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1 Penerimaan imbal jasa penjaminan (IJP)	1,439,501,322	990,606,358
2 Penerimaan klaim dari mitra co-guarantee/reasuransi/ penjaminan ulang	28,406,411	31,600,715
3 Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	3,775,370	3,534,070
4 Pembayaran IJP co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang	(132,169,971)	(142,896,337)
5 Pembayaran klaim kepada Terjamin	(517,836,087)	(114,878,022)
6 Pembayaran biaya-biaya	(5,026,153,019)	(2,737,208,712)
7 Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya	(264,882,454)	(559,809,685)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(4,469,358,428)	(2,529,051,612)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan hasil investasi	3,314,879,979	3,638,807,187
2 Penerimaan dari aktivitas investasi lainnya	5,831,388,813	8,228,396,092
3 Penempatan investasi yang diperkenankan	(22,511,250,000)	(2,020,000,000)
4 Perolehan aset tetap	(1,851,115,000)	(4,898,686,092)
5 Pembayaran untuk aktivitas investasi lainnya	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(15,216,096,208)	4,948,517,187
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1 Penyetoran dari setoran modal	20,000,000,000	-
2 Penerimaan dari penerbitan obligasi wajib konversi	-	-
3 Penerimaan dari aktivitas pendanaan lainnya	-	-
4 Pembayaran dividen	(800,000,000)	(550,000,000)
5 Pembayaran untuk aktivitas pendanaan lainnya	-	(1,000,000,000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	19,200,000,000	(1,550,000,000)
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(485,454,636)	869,465,575
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1,395,282,936	525,817,361
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	909,828,300	1,395,282,936

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua, disingkat PT. Jamkrida Papua (Perseroda), (dahulu PT. Jaminan Kredit Daerah Papua disingkat PT. Jamkrida Papua), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua pada tanggal 30 Desember 2013 dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh Puspo Adi Cahyono, SH., Notaris di Jayapura dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU18089.40.10.2014 tertanggal 18 Juli 2014.

Akta pendirian perusahaan tersebut mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

- 1) Akta Nomor 68 tanggal 30 September 2015 dari Puspo Adi Cahyono, SH., M.Kn., Notaris di Jayapura dan akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944319.AH.01.02. 21 Oktober 2015.
- 2) Akta Nomor 39 tanggal 24 Agustus 2016 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura, dan akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03.0074961. tertanggal 26 Agustus 2016.
- 3) Akta Nomor 109 tanggal 31 Maret 2017 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura dan akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0131561 tertanggal 28 April 2017.
- 4) Akta Nomor 37 tanggal 28 April 2017 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura dan akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0131616 tertanggal 28 April 2017.
- 5) Akta Nomor 40 tanggal 20 Oktober 2017 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura dan akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0182761 tertanggal 20 Oktober 2017.
- 6) Akta Nomor 63 tanggal 26 Februari 2018 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura yang berisi tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, memberikan kuasa dan wewenang kepada dewan komisaris untuk menentukan remunerasi, dan menentukan besaran dividen untuk tahun 2017.
- 7) Akta Nomor 28 tanggal 23 Oktober 2019 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura yang berisi tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0085927.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- 8) Akta Nomor 11 tanggal 07 November 2020 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura yang berisi tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menerima Laporan Keuangan Tahun 2019, penetapan laba tahun 2019, pembagian laba dalam tahun 2020, mengesahkan struktur organisasi tahun 2020, dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.

Perusahaan telah mendapatkan beberapa dokumen dari instansi terkait untuk menunjang kegiatan usahanya, antara lain:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Perusahaan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, dari Pemerintah Provinsi Papua - Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Nomor TDP : 01.08.1.16.0001 yang berlaku sampai dengan 17 Juli 2019.
- 2) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-145/D.05/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjamin Kredit Kepada PT. Jaminan Kredit Daerah Papua tertanggal 8 Desember 2014.
- 3) Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. BPR Anak Negeri Papua tentang Penjaminan Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah Kepada Individu, Kelompok, dan Kelembagaan Usaha dengan Nomor 04/JamkridaPapua/XI/2018-125/ANP/XI/2018 pada tanggal 26 November 2018 di Kantor PT. Jaminan Kredit Daerah Papua
- 4) Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Jakarta Raya Pialang Reasuransi tentang Jasa Konsultan dan Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) dengan Nomor 01/JamkridaPapua/II/2018-062/PKS/JakRe/02-2018 pada tanggal 26 Februari 2018 di Jakarta.
- 5) Perusahaan melakukan pengambilalihan PT. Bank Perkreditan Rakyat Phidectama Biak sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 53 tanggal 21 Desember 2020 dari Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Jayapura.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, maksud dan tujuan serta perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perseroan adalah Lembaga Penjaminan.

Kegiatan

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha perseroan sebagai berikut:

- 1) Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- 2) Penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah dan Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
- 3) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- 4) Penjaminan atas surat utang;
- 5) Penjaminan transaksi dagang;
- 6) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- 7) Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- 8) Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- 9) Penjaminan *letter of credit* (LC);
- 10) Penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- 11) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
- 12) Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- 13) Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Tempat Kedudukan

Kantor PT. Jamkrida Papua (Perseroda) berkedudukan di Jl. Lingkaran Tasangkapura No. 1A Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

2. PERMODALAN

PT. Jaminan Kredit Daerah Papua merupakan perseroan yang memiliki lingkup wilayah operasional di tingkat Propinsi Papua. Jumlah ekuitas minimal yang harus disetor ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah operasional. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan terutama pada Pasal 12. Ketentuan mengenai lingkup wilayah operasional dan jumlah minimal modal disetor selanjutnya diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. POJK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 31 mengatur untuk perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah operasional tingkat propinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.

Berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 20 Oktober 2017, modal Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nominal	Nilai	Persentase
1	Pemerintah Provinsi Papua	50.000	1.000.000	50.000.000.000	99,80%
2	Tuan Desty Pongsikabe	100	1.000.000	100.000.000	0,20%
	Jumlah	50.100		50.100.000.000	100,00%

Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat pada database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30 November 2021 Nomor AHU-AH.01.03.-0479249, diputuskan antara lain menyetujui dan menetapkan penambahan modal pada PT. Jamkrida Papua (Perseroda) menjadi sebagai berikut:

- Modal dasar berjumlah Rp 100.000.000.000,- terbagi atas 100.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-.
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 70,1% atau sejumlah 70.100 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 70.100.000.000,- oleh para pemegang saham, sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nominal	Nilai	Persentase
1	Pemerintah Provinsi Papua	70.000	1.000.000	70.000.000.000	99,86%
2	Tuan Desty Pongsikabe	100	1.000.000	100.000.000	0,14%
	Jumlah	70.100		70.100.000.000	100,00%

Komposisi tingkat kepemilikan pemegang saham mengalami perubahan, yaitu untuk Pemerintah Provinsi Papua mengalami kenaikan dari 99,80% menjadi 99,86% dan untuk tingkat kepemilikan Tuan Desty Pongsikabe mengalami penurunan dari 0,20% menjadi 0,14%.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 07 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Perseroan Daerah Jaminan Kredit Daerah Provinsi Papua, susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama . : Desty Pongsikabe, ST.,M.Si.
- Direktur : Edwin Maikel Jelmau

Komisaris

- Komisaris Utama : Timmi Gurik
- Komisaris : Fransisko

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dengan dasar harga perolehan dan disajikan sesuai dengan periode akuntansi yang bersangkutan. Dalam laporan pemeriksaan ini disajikan untuk periode akuntansi tahun 2018 secara perbandingan dengan angka audit tahun buku 2017 dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari uang tunai yang ada di dalam kas perusahaan dan dana perusahaan yang disimpan di Bank dalam bentuk giro, yang sampai dengan saat ini tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya. Pencatatan saldo kas dan setara kas dilakukan pada saat terdapat penerimaan atau pengeluaran kas & setara kas (cash basic). Perusahaan belum melakukan rekonsiliasi bank namun telah melaksanakan cash opname atas saldo kas.

c. Investasi Lancar

Investasi lancar merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diluar aktivitas operasional utama perusahaan untuk berinvestasi pada deposito dalam beberapa bank umum dan BPR di daerah Papua serta Reksadana.

d. Biaya Dibayar Dimuka

Merupakan biaya dibayar dimuka yang dikeluarkan perusahaan atas Asuransi kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan.

e. Investasi Tidak Lancar

Investasi Tidak lancar merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diluar aktivitas operasional utama perusahaan untuk berinvestasi pada obligasi yang dikeluarkan.

f. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disusutkan berdasarkan umur aset tidak lancar tersebut sesuai masa manfaat, yang ditentukan sendiri oleh perusahaan sesuai dengan kelaziman akuntansi yang berterima umum di Indonesia, untuk aset tidak lancar lainnya merupakan

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

aplikasi sistem penjaminan dan keuangan yang di aplikasikan pada manajerial perusahaan. Untuk tiap jenis aset tidak lancar sebagai berikut :

No	Jenis Aktiva	Prosentase	Umur	Metode
1	Inventaris Kendaraan	25-12,5%	8-4 Tahun	Garis Lurus
2	Inventansi kantor	25-12,5%	8-4 Tahun	Garis Lurus
3	Aset Tidak Lancar Lainnya	5 %	20 Tahun	Garis Lurus

g. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Yang Ditangguhkan

Merupakan bagian imbal jasa penjaminan yang diterima perusahaan yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan dan besarnya ditetapkan secara proposional untuk tiap periode penjaminan yang bersangkutan.

h. Hutang IJP Co-Guarantee/Reasuransi/Penjaminan Ulang

Merupakan hutang imbal jasa penjaminan dari kegiatan penjaminan bersama antara para pihak perusahaan penjamin dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

i. Cadangan Klaim

Merupakan estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan perusahaan, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan sesuai ketentuan berlaku. Pembentukan cadangan klaim telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, pasal 22. Melalui peraturan tersebut OJK mewajibkan penyelenggara usaha lembaga penjamin untuk membentuk cadangan klaim paling sedikit 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, atau penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*), dipilih salah satu yang lebih banyak.

j. Hutang Pajak

Merupakan saldo selisih antara taksiran pajak dan beban atas pajak final yang dibayarkan oleh perusahaan.

k. Imbalan Kerja (PSAK 24)

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima Karyawan dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan tidak membentuk cadangan atas imbalan pasca kerja sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24, akan tetap perusahaan telah mengikutsertakan karyawan serta membayar semua kewajibannya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan guna memperoleh manfaat apabila karyawan sakit, mengalami kecelekaan kerja, meninggal dunia dan memasuki usia pensiun (jaminan hari tua).

l. Pendapatan & Beban

Pendapatan & beban perusahaan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut dan dicatat secara akrual (*Accrual Basic*). Semua pencatatan pada akun ini dilakukan sesuai dengan klasifikasi pendapatan serta biaya yang terjadi.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT. Jamkrida Papua (Perseroda) memperoleh pendapatan dari kegiatan operasional utama yaitu kegiatan penjaminan dan pendapatan lain-lain di luar kegiatan penjaminan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan diperjelas oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Pada POJK Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kegiatan operasional utama dari lembaga penjaminan adalah kegiatan penjaminan dan dari kegiatan tersebut perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP. Besarnya tarif IJP diatur pada Pasal 18 ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

- a) Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 - (1) Rasio Klaim;
 - (2) Jenis kredit atau pembiayaan;
 - (3) Cakupan penjaminan; dan
 - (4) Jangka waktu penjaminan;
- b) Biaya operasional, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran; dan
- c) Keuntungan.

Biaya atau beban diklasifikasikan sesuai dengan manfaatnya, dalam:

- a) Biaya Operasional, meliputi semua beban yang berhubungan dengan kegiatan operasional utama perusahaan dalam melakukan kegiatan penjaminan.
- b) Biaya Administrasi dan Umum, meliputi biaya-biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya ini meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijaksanaan,
- c) Biaya Pemasaran, meliputi biaya-biaya yang terjadi dan berhubungan langsung dengan kegiatan pemasaran dari perusahaan.

5. PERPAJAKAN

Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak badan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak - Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku - KPP Pratama Jayapura Nomor: S-11313KT/WPJ.18/KP.0403/2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 70.633.806.8-952.000.

6. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Laporan Keuangan PT. Jamkrida Papua (Perseroda) tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Yaniswar & Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 0090/3.0377/AU.1/09/1533-1/1/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian" berkaitan dengan basis opini bahwa perusahaan belum melakukan konsolidasi dengan Anak Perusahaan PT. BPR Phidectama Biak dan belum melakukan pencadangan imbalan pasca kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Imbalan Kerja.

Laporan Keuangan tersebut disajikan kembali untuk tujuan komparatif.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2020
1 Kas	47,816,354	-
2 Bank	862,011,946	1,395,282,936
Jumlah	909,828,300	1,395,282,936

Saldo bank terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2020
1 BPD Papua KCU (1000119066075)	79,911,723	24,981,743
2 BPD Papua Rek. Penampung IJP (100002222012011360)	8,716,962	40,328,902
3 BPD Papua Yotefa (1130110000622)	9,249,507	9,609,507
4 BPD Papua Darfuar (5050119000021)	27,067,533	24,444,198
5 BPD Papua KC Abepura (1900110000515)	24,692,654	50,544,761
6 BPD Papua KCP Abepura (1020119000040)	20,453,060	33,546,642
7 BPR Irian Sentosa (2111105879)	10,660,550	78,037,592
8 BPR Irian Sentosa IJP (2111106215)	7,375,653	15,924,830
9 Bank Mandiri (1540023322336)	34,584,186	3,015,081
10 Bank Mandiri (1540012384396)	4,975,000	4,969,000
11 Bank CIMB Niaga (800121665600)	216,014,355	291,334,019
12 Bank BNI (0372311310)	64,803,685	36,469,501
13 Bank Mayapada (79530000077)	12,390,903	10,983,671
14 BPR Sunni (0011100140)	53,626,396	16,614,695
15 BPR Phidectama Abepura (10155185)	20,401,976	32,135,025
16 BPR Papua Mandiri Makmur (3301001026879)	20,043,578	32,922,322
17 BPR Papua Mandiri Makmur IJP (3301001027328)	11,479,211	13,012,575
18 BPR Sunni IJP (0011100555)	651,687	78,292,866
19 BPR Phidectama Abepura IJP (10158303)	6,149,359	13,645,096
20 BPR Anak Negeri Papua (0011200048)	17,683,814	27,684,297
21 Bank Mandiri (1020007187955)	155,006,014	180,199,246
22 BPD Papua KCP Waena (1100119000035)	8,256,481	58,254,565
23 BPR Anak Negeri Papua IJP (0011200354)	13,712,696	4,433,750
24 BPR Nusa Intim (23027690)	20,302,273	62,324,248
25 BPR Nusa Intim (23027704)	4,024,872	16,176,916
26 BPR Phidectama Biak (330.10.00.09172.3)	9,777,819	235,397,889
Jumlah Bank	862,011,946	1,395,282,936

8. INVESTASI LANCAR

Merupakan penempatan dana perusahaan dalam bentuk reksa dana dan deposito berjangka di bank umum dan BPR dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan perpanjangan otomatis (*authomatic roll over/ARO*), sebagai berikut:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
- Reksa dana		
Mandiri Investa Dana Utama (MIDU)	3,508,750,000	-
Seruni Pasar Uang	-	1,500,000,000
Jumlah Reksa dana	<u>3,508,750,000</u>	<u>1,500,000,000</u>
- Deposito Berjangka		
Bank Papua	1,370,000,000	3,370,000,000
Bank Mayapada	6,570,000,000	70,000,000
BPR Sunni Jayapura	5,000,000,000	5,000,000,000
BPR Phidectama Jayapura	6,700,000,000	4,700,000,000
BPR Papua Mandiri Makmur	6,103,396,000	4,103,396,000
BPR Anak Negeri Papua	6,150,000,000	5,150,000,000
BPR Nusa Intim	3,300,000,000	4,300,000,000
BPR Phidectama Biak	7,466,363,908	4,286,363,908
Jumlah Deposito Berjangka Tidak Terikat	<u>42,659,759,908</u>	<u>30,979,759,908</u>
- Deposito untuk penambahan modal di PT. BPR Phidectama Biak		
BPR Phidectama Biak	-	2,000,000,000
Bank Papua Cabang Biak	-	2,000,000,000
Jumlah Deposito untuk penambahan modal BPR	<u>-</u>	<u>4,000,000,000</u>
Jumlah Investasi Lancar	<u>46,168,509,908</u>	<u>36,479,759,908</u>

Tingkat pendapatan/suku bunga tahun 2021:

- Tingkat pendapatan reksa dana : 5,44% variable
- Suku bunga deposito:
 - Bank Papua : 3,98% - 5,15%.
 - Bank Mayapada : 4,25 - 5,30%.
 - BPR Sunni Jayapura : 7,00% - 8,00%.
 - BPR Phidectama Jayapura : 6,50% - 9,25%.
 - BPR Papua Mandiri Makmur : 6,00% - 8,00%.
 - BPR Anak Negeri Papua : 5,00% - 6,00%.
 - BPR Nusa Intim : 8,25% - 9,00%.
 - BPR Phidectama Biak : 5,00% - 8,00%.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Merupakan pendapatan bunga atas deposito dan obligasi yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdiri dari:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
- PT. BPR Phidectama Biak	126,462,993	107,630,100
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>126,462,993</u>	<u>107,630,100</u>

Piutang lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan pengambilalihan dan biaya pendidikan Komisaris dan Direksi PT. BPR Phidectama Biak yang dibebankan/ditagihkan ke PT. BPR Phidectama Biak.

PT. Jamkrida Papua (Perseroda) selaku Induk Perusahaan telah mengirimkan surat konfirmasi kepada PT. BPR Phidectama Biak dengan surat No. 014/Mkeu/JKD/II/2022 dan telah dijawab oleh PT. BPR Phidectama Biak dengan surat No. 015/BPRP-BIK/OPS/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang intinya menyatakan belum sepakat terhadap kedua hal tersebut.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Terdiri dari:

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
- Sewa Ruko untuk Kantor	-	62,580,645
- Asuransi Kendaraan	3,110,325	3,181,162
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	<u>3,110,325</u>	<u>65,761,807</u>

Asuransi dibayar di muka merupakan biaya asuransi untuk 3 (tiga) kendaraan pada PT. Asuransi Sinar Mas, terdiri dari kendaraan operasional milik sendiri 2 unit (mobil Toyota Calya dan motor Honda Vario) dan kendaraan mobil Toyota Inova bantuan peminjaman dari Gubernur Provinsi Papua.

12. INVESTASI TIDAK LANCAR

Merupakan penempatan dana perusahaan dalam bentuk obligasi untuk tujuan jangka panjang (lebih dari setahun), terdiri dari:

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
- Obligasi Negara Indonesia	8,301,596,430	8,301,596,430
- Obligasi PT Waskita Karya (Persero), Tbk.	1,041,563,889	1,041,563,889
- Obligasi PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	1,066,756,944	1,066,756,944
Jumlah Investasi Tidak Lancar	<u>10,409,917,263</u>	<u>10,409,917,263</u>

13. PENYERTAAN

Merupakan nilai penyertaan pada anak perusahaan PT. BPR Phidectama Biak sebesar Rp 8.149.500.000,- terdiri dari:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31-12-2021	31-12-2020
- Penyertaan awal pada saat akuisisi tahun 2020	950,000,000	950,000,000
- Selisih akuisisi	199,500,000	-
- Penambahan penyertaan tahun 2020	4,000,000,000	-
- Penambahan penyertaan tahun 2021	3,000,000,000	-
Jumlah Penyertaan	8,149,500,000	950,000,000

- Penyertaan pada PT. BPR Phidectama Biak tertuang dalam Akta Nomor 53 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengambilalihan yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Khair, SH, M.Kn., Notaris di Kota Jayapura dengan harga pengambilalihan sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor: S-363/KO.0605/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Susunan Pemegang Saham PT. BPR Phidectama Biak sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal	Jumlah	%
1	Tuan Ir. Agusfinus Rumansara, M. Art	116.209	10.000	1.162.090.000	96,04
2	Tuan DR. Hari Sunarto	4.791	10.000	47.910.000	3,96
	Jumlah	121.000	10.000	1.210.000.000	100,00

Dalam rangka pengambilalihan tersebut, saham PT. BPR Phidectama Biak telah dilakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dan disepakati nilai nominal yang semula Rp 10.000,- perlembar saham menjadi senilai Rp 8.264,463 sehingga nilai saham sejumlah 121.000 lembar saham adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- yang merupakan 100% dari total modal ditempatkan dan disetor pada perseroan, beserta seluruh hak yang melekat atas saham-saham, sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal	Jumlah	%
1	Tuan Ir. Agusfinus Rumansara, M. Art	116.209	8.264,463	960.404.970	96,04
2	Tuan DR. Hari Sunarto	4.791	8.264,463	39.595.030	3,96
	Jumlah	121.000	8.264,463	1.000.000.000	100,00

Pembayaran telah dilakukan oleh PT. Jamkrida Papua (Perseroda) pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp 1.000.000.000,- melalui Bank Mandiri dan sesuai Berita Acara Serah Terima Pembelian Saham PT. BPR Phidectama Biak Nomor: 100/Dirkeu/JKD-P/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

Tuan Desty Pongsikabe pada tanggal 17 Desember 2020 telah menyetorkan dana sebesar Rp 50.000.000,- kepada PT. Jamkrida Papua (Perseroda) untuk penyertaannya dalam pengambilalihan saham PT. BPR Phidectama Biak dan dananya telah masuk sesuai rekening koran PT. BPR Anak Negeri Papua.

Susunan Pemegang Saham PT. BPR Phidectama Biak setelah pengambilalihan sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal	Jumlah	%
1	PT Jamkrida Papua	114.950	10.000	1.149.500.000	95,00
2	Tuan Desty Pongsikabe	6.050	10.000	60.500.000	5,00
	Jumlah	121.000	10.000	1.210.000.000	100,00

Dari akuisisi di atas, PT. Jamkrida Papua (Perseroda) mendapatkan selisih akuisisi sebesar Rp 199.500.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

• Nilai penyertaan yang diperoleh	= Rp 1.149.500.000,-
• Pembayaran	= Rp 950.000.000,-
• Selisih akuisisi	= Rp 199.500.000,-

- Berdasarkan **Akta Nomor 04** tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat pada database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 01 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03.-0132575, diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- yang terbagi atas 200.000 lembar saham menjadi sebesar Rp15.000.000.000,- yang terbagi atas 1.500.000 lembar saham.
- 2) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan yang semula sebesar Rp1.210.000.000,- yang terbagi atas 121.000 lembar saham menjadi sebesar Rp5.210.000.000,- yang terbagi atas 521.000 lembar saham.
- 3) Menyetujui mengeluarkan 400.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,- yang masih dalam simpanan perseroan yang akan diambil oleh PT. Jamkrida Papua (Perseroda), sehingga susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut:
 - a) PT. Jamkrida Papua (Sulselbar) sebanyak 514.950 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.149.500.000,-;
 - b) Tuan Desty Pongsikabe sebanyak 6.050 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.500.000,-.

Susunan Pemegang Saham PT. BPR Phidectama Biak setelah penambahan modal dan tingkat kepemilikan menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal	Jumlah	%
1	PT Jamkrida Papua	514,950	10,000	5,149,500,000	98.84
2	Tuan Desty Pongsikabe	6,050	10,000	60,500,000	1.16
	Jumlah	521,000	10,000	5,210,000,000	100.00

Tingkat kepemilikan pemegang saham mengalami perubahan, yaitu PT. Jamkrida Papua (Perseroda) naik menjadi 98,84% dan tingkat kepemilikan Tuan Desty Pongsikabe turun menjadi 1,16%.

- Selanjutnya berdasarkan **Akta Nomor 35** tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat pada database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30 November 2021 Nomor AHU-AH.01.03.-0479249, diputuskan antara lain menyetujui dan menetapkan Penambahan Modal Inti pada PT. BPR Phidectama Biak sebesar Rp3.000.000.000,-.

Susunan Pemegang Saham PT. BPR Phidectama Biak setelah penambahan modal dan tingkat kepemilikan menjadi sebagai berikut:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai Nominal	Jumlah	%
1	PT Jamkrida Papua	814,950	10,000	8,149,500,000	99.26
2	Tuan Desty Pongsikabe	6,050	10,000	60,500,000	0.74
	Jumlah	821,000	10,000	8,210,000,000	100.00

Tingkat kepemilikan pemegang saham mengalami perubahan, yaitu PT. Jamkrida Papua (Perseroda) naik menjadi 99,26% dan tingkat kepemilikan Tuan Desty Pongsikabe turun menjadi 0,74%.

14. ASET TETAP

Mutasi aset tetap tahun 2021 sebagai berikut:

	Tahun 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	-	3,369,099,140	-	3,369,099,140
Bangunan	-	5,160,993,088	-	5,160,993,088
Kendaraan	198,995,000	-	-	198,995,000
Inventaris Kantor	259,001,000	33,790,000	-	292,791,000
Jumlah	457,996,000	8,563,882,228	-	9,021,878,228
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	68,451,946	-	68,451,946
Kendaraan	96,434,506	25,035,494	-	121,470,000
Inventaris Kantor	225,983,200	26,071,615	-	252,054,815
Jumlah	322,417,706	119,559,055	-	441,976,761
Nilai Buku				
Tanah	-	-	-	3,369,099,140
Bangunan	-	-	-	5,092,541,142
Kendaraan	102,560,494	-	-	77,525,000
Inventaris Kantor	33,017,800	-	-	40,736,185
Jumlah	135,578,294	-	-	8,579,901,467

Penambahan aset tetap dalam tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tanah merupakan reklasifikasi dari Aset Tidak Lancar Lainnya, yaitu Gedung Dalam Tahap Renovasi, yang telah selesai dan dimanfaatkan. Nilai tanah dialokasikan dengan menggunakan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas harga perolehan tanah dan bangunan gedung kantor tahun 2020. Alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Ardipura, luas 382 M2, Surat Ukur tertanggal 27 Januari 1998 Nomor 02/1998, terletak di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Bangunan merupakan reklasifikasi dari Aset Tidak Lancar Lainnya, yaitu Gedung Dalam Tahap Renovasi, yang telah selesai dan dimanfaatkan. Nilai bangunan dialokasikan dengan menggunakan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas pembelian tanah dan bangunan gedung kantor tahun 2020 yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Ardipura, luas 382 M2, Surat Ukur tertanggal 27 Januari 1998 Nomor 02/1998, terletak di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, ditambah biaya renovasi gedung. Gedung mulai dimanfaatkan sejak tanggal 27 Agustus 2021 setelah renovasi tahap 1 dan 2 selesai dilaksanakan.

Selain itu terdapat pembelain rumah toko (ruko) di Jalan Erlangga, Biak Numfor dengan nilai perolehan sebesar Rp1.917.325.000,- yang terdiri dari:

- Harga beli	= Rp 1.800.000.000,-
- Biaya-biaya notaris: pajak penjual, roya, akta jual beli, balik nama, PNBP dan pendaftaran, cetak BPHTB, penurunan hak, dan pengikatan jual beli	= Rp 117.325.000,-
Jumlah	= Rp 1.917.325.000,-

Akta Jual Beli dan Proses Penurunan Hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 17/BUROKUD atas nama Henoch Kondengis pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Biak Numfor saat pemeriksaam masih dalam proses melalui Feronika Yupiyanti, SH., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Biak, Papua sebagaimana Surat Keterangan No. 006/I/PPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Mutasi aset tetap tahun 2020 sebagai berikut:

	Tahun 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	198,995,000	-	-	198,995,000
Inventaris Kantor	259,001,000	-	-	259,001,000
Jumlah	457,996,000	-	-	457,996,000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	68,835,756	27,598,750	-	96,434,506
Inventaris Kantor	170,709,342	55,273,858	-	225,983,200
Jumlah	239,545,098	82,872,608	-	322,417,706
Nilai Buku				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	130,159,244	-	-	102,560,494
Inventaris Kantor	88,291,658	-	-	33,017,800
Jumlah	218,450,902	-	-	135,578,294

15. ASET TIDAK BERWUJUD

Merupakan nilai bersih dari aplikasi/program sistem informasi PT. Jamkrida Papua (Perseroda) dengan amortisasi 5% per tahun, sebagai berikut:

	31-12-2021	31-12-2020
- Sistem Informasi Jamkrida	235,000,000	235,000,000
- (-) Akumulasi Amortisasi	(58,750,000)	(47,000,000)
Jumlah - bersih	176,250,000	188,000,000

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31-12-2021	31-12-2020
- Gedung Dalam Tahap Renovasi		
Harga Pembelian	-	4,700,000,000
Biaya Notaris	-	198,686,092
Pekerjaan Renovasi yang sedang berjalan	377,561,310	164,706,000
	<u>377,561,310</u>	<u>5,063,392,092</u>

Gedung dalam tahap renovasi merupakan pengeluaran atas pekerjaan renovasi bangunan yang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masih sedang berjalan. Gedung dalam tahap renovasi per 30 Desember 2020 dalam tahun 2021 telah dialihkan sebagai Aset Tetap karena telah dimanfaatkan.

17. IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) LANCAR

Terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2020
- Sertifikat Penjaminan Kredit Konstruksi	5,812,856	-
- Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Mikro	95,528,195	64,074,024
- Sertifikat Penjaminan Kredit Multiguna	276,810,664	309,225,696
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Pelaksanaan	66,194,753	61,100,854
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Pemeliharaan	16,894,692	10,538,906
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Penawaran	1,108,696	18,800
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Uang Muka	23,727,400	150,045
Jumlah	<u>486,077,255</u>	<u>445,108,325</u>

Merupakan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

18. UTANG IJP CO-GUARANTEES/REASURANSI/PENJAMINAN ULANG

Utang IJP co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang per 31 Desember 2021 nihil, sedangkan per 31 Desember 2020 merupakan utang IJP yang timbul dari kegiatan penjaminan bersama dengan pihak pialang asuransi (broker) PT. Jakarta Raya Pialang Reasuransi sebesar Rp 16.662.001,-.

19. UTANG KOMISI

Utang komisi per 31 Desember 2021 nihil, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.362.834,-.

20. CADANGAN KLAIM

Merupakan estimasi cadangan klaim yang akan menjadi tanggungan sendiri per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 96.654.230,- dan Rp 5.771.904,-.

21. UTANG PAJAK

Merupakan utang PPh Pasal 4 Ayat 2 atas peredaran bruto yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.066.245 dan Rp 374.533,-.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

Merupakan penerimaan premi yang belum diterbitkan sertifikat penjaminannya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 212.676.763,- dan Rp 138.159.867,-.

23. IJP YANG DITANGGUHKAN

Terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2020
- Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Mikro	85,042,172	45,993,576
- Sertifikat Penjaminan Kredit Multiguna	307,574,895	459,279,876
- Sertifikat Penjaminan Pelaksanaan	-	60,786,372
Jumlah	392,617,067	566,059,823

Merupakan IJP yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun. IJP yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan sesuai jangka waktu penjaminan dan setelah diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP).

24. MODAL SAHAM

Terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2019
- Pemerintah Provinsi Papua	70,000,000,000	50,000,000,000
- Tuan Desty Pongsikabe	100,000,000	100,000,000
Jumlah	70,100,000,000	50,100,000,000

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan 2.

25. CADANGAN UMUM

Terdiri dari:

	31-12-2021	31-12-2020
- Pembagian laba tahun 2015	338,793,134	338,793,134
- Pembagian laba tahun 2016	508,878,915	508,878,915
- Pembagian laba tahun 2017	158,707,089	158,707,089
- Pembagian laba tahun 2018	208,314,602	208,314,602
- Pembagian laba tahun 2019	317,593,371	317,593,371
- Pembagian laba tahun 2020	307,840,580	-
Jumlah	1,840,127,692	1,532,287,112

Pembentukan cadangan umum dari pembagian laba tahun 2020 sesuai Akta Nomor 35 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat pada database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30 November 2021 Nomor AHU-AH.01.03.-0479249.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

26. SELISIH AKUISISI

Merupakan selisih dalam pengambilalihan anak perusahaan PT. BPR Phidectama Biak sebesar Rp 199.500.000,-.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan 13.

27. LABA/(RUGI) TAHUN LALU

Terdiri dari:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
- Saldo Laba/(Rugi) s/d periode sebelumnya	1,145,230,502	1,145,230,502
- Pembentukan Cadangan Umum	(684,615,062)	(684,615,062)
- Pembagian Dividen	(550,000,000)	(550,000,000)
- Pembagian Tantiem	(100,000,000)	(100,000,000)
- Laba Tahun 2019	1,270,373,486	1,270,373,486
- Laba Tahun 2020	1,231,362,323	-
- Pembagian Laba Tahun 2020	(1,231,340,581)	-
Jumlah	<u>1,081,010,668</u>	<u>1,080,988,926</u>

Dalam tahun 2021, Perseroan melakukan pembagian laba tahun 2020 sebesar Rp 1.181.340.581,- sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 35 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jayapura, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat pada database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30 November 2021 Nomor AHU-AH.01.03.-0479249.

Pembagian laba tahun 2020 terdiri dari:

- Cadangan Umum (25%)	= Rp 307.840.581,-
- Dividen	= Rp 800.000.000,-
- Tantiem	= Rp 100.000.000,-
- Bonus prestasi staff	= Rp 23.500.000,-
Jumlah	<u>= Rp 1.231.340.581,-</u>

28. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

Merupakan pendapatan operasional dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas Sertifikat Penjaminan (SP) yang telah diterbitkan dalam tahun 2020 dan 2019 setelah dikurangi beban, sebagai berikut:

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
Pendapatan IJP bruto		
- Sertifikat Penjaminan Kredit Konstruksi	129,115,454	-
- Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Mikro	312,093,920	-
- Sertifikat Penjaminan Kredit Multiguna	372,613,441	-
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Pelaksanaan	185,238,472	-
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Pemeliharaan	21,569,215	-
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Penawaran	4,316,104	-
- Sertifikat Penjaminan Jaminan Uang Muka	472,466,645	-
Jumlah Pendapatan IJP bruto	1,497,413,252	769,449,942
Pendapatan klaim IJP co-guarantee/IJP/premi reasuransi	-	-
IJP co-guarantee/IJP/premi reasuransi	(115,507,970)	(159,558,338)
Pendapatan komisi	-	-
Beban komisi	(43,902,448)	(73,549,544)
Jumlah Pendapatan IJP netto	1,338,002,834	536,342,060

29. BEBAN KLAIM

Merupakan beban klaim dan premi asuransi dalam rangka memperoleh IJP, sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
- Beban klaim bruto	517,836,087	114,878,022
- Beban klaim co-guarantee/IJP/premi reasuransi	(28,406,411)	(31,600,715)
- Penurunan/(kenaikan) cadangan klaim	90,882,326	(24,672,766)
Jumlah Beban Klaim netto	580,312,002	58,604,541

30. PENDAPATAN INVESTASI

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi dalam tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
- Pendapatan Bunga Deposito	2,493,161,203	2,656,917,063
- Pendapatan Bunga Obligasi	735,559,562	708,759,749
- Pendapatan Reksadana	102,149,181	231,678,211
Jumlah Pendapatan Investasi	3,330,869,946	3,597,355,023

31. BEBAN OPERASIONAL

Merupakan beban operasional berupa gaji, biaya umum dan administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban operasional lainnya pada tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
- Beban sumber daya manusia	2,208,175,016	2,042,836,556
- Beban administrasi dan umum	505,240,350	339,877,149
- Beban penyusutan dan amortisasi	132,488,970	94,622,608
- Beban operasional lainnya	414,312,261	332,758,840
Jumlah Beban Operasional	3,260,216,598	2,810,095,153

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL

Merupakan pendapatan/(beban) non operasional tahun 2021 dan 2020 berupa sewa, jasa giro dan bunga tabungan, pendapatan subrogasi dan beban non operasional, sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
- Pendapatan sewa, jasa giro, bunga tabungan dan lain-lain	218,762,321	17,179,607
- Pendapatan subrogasi	3,775,370	600,068
- Beban non operasional	(11,277,000)	(46,461,709)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	211,260,691	(28,682,034)

Perseroan mengakui pendapatan sewa sebesar Rp 180.000.000,- berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Ruko Kantor di Jl. Erlangga, Biak Numfor tertanggal 05 November 2021 dengan PT. BPR Phidectama Biak untuk masa 10 tahun terhitung dari 05 November 2021 sampai dengan 05 November 2031, dengan biaya sewa sebesar Rp 180.000.000,- pertahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun. Sampai dengan saat pemeriksaan ini, pembayaran sewa belum diterima dan Perseroan mengakui pendapatan sewa yang masih hasur diterima 100% dalam tahun 2021.

Seharusnya pendapatan sewa yang masih harus diterima dihitung berdasarkan waktu sewa yang telah lewat, yaitu 2 bulan (November – Desember 2021), yaitu sebesar Rp 30.000.000,-, sehingga lebih mencatat pendapatan sewa sebesar Rp 150.000.000,-.

33. PAJAK PENGHASILAN

Merupakan beban pajak penghasilan badan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.197.507,- dan Rp4.953.032,-.

Besarnya pajak penghasilan terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian.

34. KONDISI PEREKONOMIAN TAHUN 2021

Dikutip dari Siaran Pers Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: HM.4.6/380/SET.M.EKON.3/11/2021 tanggal 05 November 2021 bertajuk **"Ekonomi Triwulan-III 2021 yang Tetap Tumbuh Positif Memberikan Optimisme Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi *demand* dan *supply* tetap terjaga. Percepatan realisasi dari hasil *refocusing* anggaran Program PEN yang mengikuti dinamika pandemi selama Triwulan III-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 0,66% (yoy).

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk prospek ke depan, sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang terus terjadi, Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM secara lebih luas namun tetap dalam pengawasan dan penerapan protokol Covid-19 secara disiplin. Kondisi yang kondusif ini memungkinkan permintaan bertumbuh dan perekonomian terus mengalami pemulihan. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada beberapa indikator utama yang menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Lebih lanjut, peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 dan berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi diperkirakan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Di pihak lain, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 18-19 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun walaupun masih terbatas. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB *overnight* dan suku bunga 1 bulan deposito perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 128 bps dan 202 bps sejak Juni 2020 menjadi 2,80% dan 3,50% pada Juni 2021. Di pasar kredit, penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan terus berlanjut, meski dalam besaran yang lebih terbatas, yaitu menurun sebesar 155 bps sejak Juni 2020 menjadi 8,82% pada Juni 2021. Penurunan didorong oleh menurunnya Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) dan *overhead cost* (OHC), sementara margin keuntungan masih meningkat pada kelompok bank BUMN dan BUSN. Di sisi lain, suku bunga kredit baru perbankan di semua kelompok bank kembali naik sejalan dengan meningkatnya premi risiko, di tengah peningkatan kasus Covid-19 pada Juni 2021. Meskipun demikian, suku bunga kredit baru KPR turun sehingga mampu terus mendorong peningkatan pertumbuhan KPR. Penurunan SBDK KPR sebesar 212 bps pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru KPR sebesar 124 bps pada periode yang sama. Bank Indonesia mengharapkan perbankan untuk terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha.

Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 16 Desember 2021, Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 3,5 persen atau tetap di level rendah. BI menilai, akibat kebijakan tersebut, suku bunga perbankan terus mengalami tren penurunan.

Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) *overnight* turun 25 basis poin (bps) sejak November 2020 menjadi 2,79 persen. Begitu pula suku bunga deposito satu bulan perbankan yang dalam kurun waktu sama turun 145 bps menjadi 3,05 persen. Di pasar kredit, penurunan suku bunga perbankan terus berlanjut diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok bank, kecuali untuk bank prekreditasi rakyat (BPD). Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru.

Namun demikian penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih rendah daripada penurunan suku bunga deposito perbankan menyebabkan *spread* antara suku bunga kredit dan deposito tersebut terus melebar dan Net Interest Margin (NIM) perbankan terus mengalami peningkatan.

PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Bank Indonesia memandang bahwa ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit masih cukup lebar. Selain karena tingkat suku bunga acuan yang rendah, likuiditas yang sangat longgar turut membantu penurunan suku bunga perbankan secara umum. Kondisi likuiditas sangat longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada usaha pada usaha penjaminan di Indonesia.

3. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT. Jamkrida Papua (Perseroda) bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen telah dibahas dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2022.